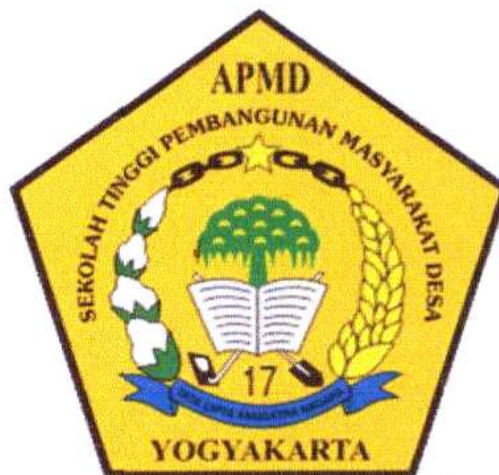


**PEMBERDAYAAN KAUM PEREMPUAN OLEH ORGANISASI  
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)  
DI KALURAHAN UMBULHARJO, KAPANEWON CANGKRINGAN,  
KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



**DISUSUN OLEH:**

**KRISANTA DARIA LINDA  
18520109**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

**2022**



**PEMBERDAYAAN KAUM PEREMPUAN OLEH ORGANISASI  
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)  
DI KALURAHAN UMBULHARJO, KAPANEWON CANGKRINGAN,  
KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Strata I (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA I (S1)  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta




Hari : Selasa

Tanggal : 15 Maret 2022

Jam : 09.00 WIB


Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

### TIM PENGUJI

| NAMA                             | TANDA TANGAN                                                                          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si |  |
| 2. Drs. Sumarjono, M.Si          |   |
| 3. Utami Sulistiana S.P., M.P    |  |

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

  
  
Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Krisanta Daria Linda

NIM : 18520109

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Kaum Perempuan oleh Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Maret 2022



Penulis

Krisanta Daria Linda

18520109

## **MOTTO**

**“Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan”**

**(Yesaya 41:10)**

**“Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang”**

**(Amsal 23:18)**

***“With god all things are possible”***

**(Krisanta Daria Linda)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kemurahan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Dengan ungkapan hormat dan rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua saya yaitu Bapak David S.Pd. dan Mama Fransina yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan yang menjadi motivator dan telah memberi dukungan baik secara moril maupun materiil sehingga saya dapat menyelesaikan studi S1;
2. Saudara dan sudari saya yaitu Kakak Florinda Tyas Widi Sunta A.Md.Keb, Adik Krisantus Berlyanda dan Bernadeta Farida serta semua Keluarga Besar yang telah menjadi penyemangat bagi saya dalam menyelesaikan pendidikan;
3. Bapak/Ibu Dosen STPMD “APMD Yogyakarta;
4. Sahabat SMK di Pontianak yaitu Magdalena Putri S.E dan Maria Adelinda yang selalu memberi semangat kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini; dan
5. Sahabat-sahabat saya di tanah rantau yang telah mendukung saya sampai pada tahap ini yaitu Vallentina F, Veronika Lula, Trifornia, Mega, Listyn, Rhen, Mitha, Herry, Abe, Xaveriani, Hilaria, Angel, Asna, Saylin, Bowo, Abi, teman-teman kos dan semua sahabat yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia-Nya yang besar, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pemberdayaan Kaum Perempuan oleh Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di STPMD “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta;
3. Bapak Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar membimbing saya dengan sumbangan pemikiran, pengetahuan, gagasan serta nasehat yang mendukung penyusunan skripsi;

4. Bapak/Ibu Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah mengajar dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan;
5. Pemerintah Kalurahan Umbulharjo dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang telah memberikan dukungan serta izin penelitian;
6. Bapak David dan Mama Fransina, selaku orang tua yang selalu bersedia menjadi teman diskusi dan mendukung saya dengan sumbangan pemikiran, pengetahuan, dan gagasan dalam penyusunan skripsi ini; dan
7. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dan perbaikan sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan penerapan di lapangan serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 2 Maret 2022

Krisanta Daria Linda



## DAFTAR ISI

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                                                | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                           | ii   |
| SURAT PERNYATAAN .....                                             | iii  |
| MOTTO .....                                                        | iv   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                                          | v    |
| KATA PENGANTAR .....                                               | vi   |
| DAFTAR ISI.....                                                    | viii |
| DAFTAR TABEL.....                                                  | x    |
| ABSTRAK.....                                                       | xi   |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                             | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                     | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                                            | 9    |
| C. Fokus Penelitian.....                                           | 9    |
| D. Tujuan Penelitian .....                                         | 10   |
| E. Manfaat Penelitian .....                                        | 11   |
| F. Literature Review.....                                          | 12   |
| G. Kerangka Konseptual.....                                        | 17   |
| 1. Konsep Governing .....                                          | 18   |
| 2. Konsep Gender Untuk Kesejahteraan Perempuan dalam Pembangunan.. | 24   |
| 3. Konsep Pemberdayaan Perempuan.....                              | 29   |
| 4. Konsep Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).....           | 33   |
| H. Metode Penelitian .....                                         | 39   |
| 1. Jenis Penelitian.....                                           | 39   |
| 2. Obyek Penelitian .....                                          | 40   |
| 3. Subyek Penelitian.....                                          | 40   |
| 5. Lokasi dan Waktu Penelitian .....                               | 42   |
| 6. Teknik Pengumpulan Data.....                                    | 42   |
| 7. Teknik Analisis Data.....                                       | 46   |

|                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....                                                                    | 47  |
| BAB II PROFIL KALURAHAN UMBULHARJO DAN PKK.....                                                              | 49  |
| A. Profil Kalurahan Umbulharjo.....                                                                          | 49  |
| 1. Sejarah Kalurahan .....                                                                                   | 49  |
| 2. Letak Geografis.....                                                                                      | 50  |
| B. Profil PKK Kalurahan Umbulharjo .....                                                                     | 56  |
| 1. Latar Belakang .....                                                                                      | 56  |
| 2. Kegiatan Umum .....                                                                                       | 57  |
| 3. Kegiatan Khusus .....                                                                                     | 60  |
| BAB III PEMBERDAYAAN KAUM PEREMPUAN OLEH ORGANISASI....                                                      | 61  |
| PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) .....                                                              | 61  |
| A. Kebijakan Pemerintah Kalurahan Umbulharjo dalam Memfasilitasi Kegiatan<br>Organisasi Korporatis PKK ..... | 64  |
| B. Pengarusutamaan Gender melalui Organisasi Korporatis PKK .....                                            | 70  |
| C. Strategi Pemberdayaan oleh PKK.....                                                                       | 79  |
| D. Kegagalan PKK di Kalurahan Umbulharjo .....                                                               | 97  |
| BAB IV PENUTUP .....                                                                                         | 105 |
| A. Kesimpulan .....                                                                                          | 105 |
| B. Saran .....                                                                                               | 106 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                         | 108 |
| PEDOMAN WAWANCARA .....                                                                                      | 112 |

## DAFTAR TABEL

|           |                                                      |    |
|-----------|------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 | Profil Subyek Penelitian .....                       | 41 |
| Tabel 2.1 | Batas Wilayah Kalurahan Umbulharjo .....             | 50 |
| Tabel 2.2 | Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....              | 51 |
| Tabel 2.3 | Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga.....            | 52 |
| Tabel 2.4 | Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....            | 54 |
| Tabel 2.5 | Struktur Kepengurusan PKK Kalurahan Umbulharjo ..... | 57 |
| Tabel 2.6 | Kegiatan Umum PKK Kalurahan Umbulharjo .....         | 58 |

## ABSTRAK

Pemerintah Kalurahan Umbulharjo membentuk organisasi PKK yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan. PKK merupakan organisasi yang bertujuan untuk menjadikan kaum perempuan sebagai pribadi yang mandiri dan mampu berperan dalam ranah publik. Meskipun demikian, PKK di Kalurahan Umbulharjo belum menjadi wadah yang mampu memberdayakan kaum perempuan. Di dalam tubuh PKK itu sendiri masih berlangsung praktik eksklusif (peminggiran) terhadap kaum perempuan. Praktik eksklusif ini tampak kenyataan bahwa PKK tidak memberikan dukungan yang maksimal kepada kaum perempuan untuk mengartikulasikan kepentingannya. Akibatnya, kaum perempuan cenderung minder untuk mengartikulasikan kepentingannya pada saat musyawarah baik di tingkat padukuhan maupun tingkat kalurahan. Berdasarkan kenyataan ini, maka yang menjadi masalah penting dalam penelitian ini adalah: (a) mengapa pengarusutamaan gender dalam pembangunan melalui PKK harus dilakukan di Kalurahan Umbulharjo; dan (b) bagaimana pemberdayaan kaum perempuan oleh PKK di Kalurahan Umbulharjo?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatif. Obyek penelitian ini adalah Pemberdayaan Kaum Perempuan oleh Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Subjek penelitian ini berjumlah 10 yang meliputi Ketua dan Kader PKK, Perangkat dan masyarakat Kalurahan Umbulharjo. Penentuan subjek penelitian ini menggunakan teknik purposive, yaitu teknik penentuan informan yang didasarkan atas tujuan tertentu yakni untuk mengetahui praktik pemberdayaan kaum perempuan oleh PKK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan PKK didukung penuh oleh Pemerintah Kalurahan Umbulharjo. Dalam rangka memperlancar kegiatan PKK, Pemerintah Kalurahan Umbulharjo juga mendistribusikan sumber daya (dana kegiatan, ruangan pertemuan, meubelair, dan honorarium kader). Meskipun demikian, kehadiran PKK bukan merupakan pengejawantahan upaya membentuk institusi demokrasi di kalurahan. Sebab jabatan ketua dalam organisasi PKK merupakan sesuatu yang terberi bukan melalui suatu proses demokrasi, misalnya musyawarah anggota. Selain itu, PKK juga tunduk di bawah kepengaturan pemimpin di tingkat pusat. Hal ini tentu saja membuat PKK bekerja atau berproses dengan mengacu pada program yang telah ditetapkan oleh pemimpin di tingkat pusat/nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa PKK sudah sejak awal kehilangan kemandiriannya karena tunduk di bawah kepengaturan hierarki di atasnya. Itulah sebabnya PKK disebut sebagai institusi korporatis bukan institusi masyarakat sipil.

Kata kunci: Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan PKK.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) melakukan pemberdayaan dengan setengah hati. Hal ini terjadi karena di masa lalu, PKK merupakan institusi korporatis, yaitu institusi bentukan negara. Sekarang, di era reformasi pun, sepak terjang PKK tidak begitu jelas. Ada wilayah “abu-abu” yang dilakukan oleh PKK dalam menjalankan perannya.

Pembangunan di desa selama ini masih memfokuskan perhatian pada pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan mengandalkan investasi besar, namun kurang mengikutsertakan rakyat kecil sebagai subyek dan bagian utama dari pembangunan (Haryono, 2020: 282). Hal ini dilatari oleh konstruksi berpikir dari penganut paradigma orientalis-moderenis yang menganggap bahwa desa adalah situs kebodohan, kemandegan, kemiskinan, dan ketertinggalan. Oleh karena itu, bagi penganut paham ini, untuk merubah desa, maka strategi perubahan yang mesti diusung adalah modernisasi, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi (Sutoro Eko, 2017: 9)

Paradigma pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi pada gilirannya meminggirkan pembangunan sosial. Pembangunan sosial dianggap sebagai sesuatu yang bersifat residual (sisa-sisa dari pertumbuhan ekonomi).

Padahal, pembangunan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi dan kedua elemen ini berjaln kelindan satu sama lain. Absennya perhatian pada pembangunan sosial mengakibatkan terjadinya eksklusi pembangunan pada masyarakat bawah, rakyat miskin, dan kaum rentan. Mereka mengalami ketertutupan akses serta tertinggal dalam setiap proses pembangunan (Haryono, 2020: 282).

Kaum perempuan merupakan salah satu bagian dari kaum rentan ini. Kaum perempuan desa adalah komponen kelompok warga desa yang miskin dan rentan dipinggirkan secara sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini dilatari oleh budaya patriaki yang terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat yang membentuk dan memposisikan perempuan sebagai masyarakat nomor dua. Eksistensi perempuan mencoba untuk menjalankan peranan publik melalui partisipasi. Namun, tetap saja kebanyakan hanya ditempatkan sebagai formalitas belaka. Bahkan, pekerjaan perempuan seringkali dikategorikan sebagai “pekerjaan gratis”. Artinya, pekerjaan yang tidak bernilai atau kurang bernilai secara finansial. Pekerjaan ini lebih bersifat pekerjaan mengasuh, melayani masyarakat, pekerjaan pembantu rumah tangga dan sebagainya.

Dengan kenyataan seperti ini, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan perempuan agar dapat terlibat dalam pembangunan desa. Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan perempuan yaitu melalui pemberdayaan. Pendekatan pemberdayaan diasumsikan bahwa jika ingin meningkatkan kapasitas perempuan, maka dibutuhkan suatu upaya untuk meningkatkan kekuasaannya untuk memperperoleh akses pada pelayanan



publik dan untuk merubah nasibnya sendiri. Artinya, pendekatan ini menghendaki pelibatan kaum perempuan tidak saja sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek (pelaku aktif), sebagai orang yang merumuskan sendiri apa yang menjadi kebutuhan mereka (Pratama, 2013: 12).

Beberapa ahli studi perempuan menyatakan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan posisi tawar perempuan adalah melalui pengorganisasian. Hal ini sejalan dengan anjuran yang disampaikan oleh penganut paham strukturalis-radikalis. Penganut paham strukturalis-radikalis memandang bahwa desa adalah situs ketimpangan, penindasan, penghisapan elit terhadap kaum proletar. Oleh karena itu, untuk merubah desa, maka mereka mengusung ide yaitu mendidik dan mengorganisir rakyat (Sutoro Eko, 2017: 9). Pengorganisasian dianggap sebagai langkah paling konkret untuk dapat memberdayakan masyarakat (terutama perempuan) itu secara lebih baik.

Salah satu organisasi yang berikhtiar untuk memberdayakan kaum perempuan di desa adalah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Organisasi PKK bertujuan untuk memberdayakan perempuan agar dapat menjadi pribadi yang mandiri dan dapat membina keluarganya. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan pembangunan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sebagai sebuah organisasi, PKK diharapkan menjadi wadah potensial dan motor penggerak pembangunan khususnya dalam hal pemberdayaan keluarga. Singkatnya, PKK adalah sebuah organisasi

yang berbasis pada keluarga yang dapat digunakan sebagai ujung tombak pembangunan (Nurdewantoro, 2015: 100).

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga merupakan organisasi masyarakat yang diperuntukkan bagi para wanita agar dapat mengembangkan dirinya di dalam masyarakat (Arisandi 2015: 1887). Melalui pendapat ini dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah organisasi yang khusus dibentuk untuk memberdayakan kaum perempuan agar dapat mengembangkan dirinya di dalam lingkungan masyarakat. Jadi, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang telah dilegalkan oleh pemerintah untuk memberdayakan perempuan.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) lahir dari keputusan pemerintah untuk merevitalisasi dan mengelompokkan organisasi perempuan di bawah departemen dalam federasi. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah organisasi yang mewadahi perempuan yang tidak berada di bawah departemen. Kehadiran PKK selain diharapkan mampu membawa keluarga pada kondisi sejahtera dan mandiri, juga mampu membebaskan perempuan dari belenggu budaya patriarki, sehingga memiliki kemandirian. Melalui PKK diharapkan harkat dan martabat perempuan sebagai bagian dari keluarga dapat ditingkatkan (Hanis dan Marzaman, 2019: 124).

Organisasi PKK merupakan mitra pemerintah. Keberadaan organisasi PKK dapat mendukung dan membantu kinerja pemerintah desa dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat terutama kaum perempuan. PKK dapat

membantu pemerintah dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di Indonesia. Oleh karena itu, PKK perlu diberi kesempatan untuk terlibat dalam agenda pembangunan.

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pengarusutamaan gender sudah berjalan dengan baik melalui sosialisasi, koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hingga Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Komitmen akan keterlibatan perempuan dalam pembangunan di Yogyakarta telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013. Untuk mewujudkan pengarusutamaan gender, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggandeng berbagai organisasi maupun lembaga masyarakat yang ada. Salah satu organisasi masyarakat yang digandeng oleh pemerintah adalah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Begitu pula di tingkat kalurahan, salah satu organisasi yang mesti terlibat dalam pembangunan kalurahan adalah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan kaum perempuan untuk terlibat dalam pembangunan di kalurahan. Salah satu kalurahan yang masih mengandalkan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam pembangunan adalah Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan Umbulharjo selain merupakan salah satu struktur organisasi desa, juga merupakan gerakan yang ikut serta dalam pembangunan desa.

Berdasarkan data yang diperoleh dari profil kalurahan, diketahui bahwa jumlah penduduk Kalurahan Umbulharjo pada tahun 2021 sebanyak 5.103 jiwa dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.504 (49.07%) dan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 2.599 (50.93%). Data tersebut menggambarkan bahwa penduduk Kalurahan Umbulharjo didominasi oleh penduduk berjenis kelamin perempuan. Dengan begitu, sumber daya manusia di Kalurahan Umbulharjo cukup memadai untuk menopang pembangunan kalurahan. Dalam kerangka itu, kaum perempuan perlu dilibatkan dalam pembangunan kalurahan.

Di Kalurahan Umbulharjo, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan tempat penampungan aspirasi perempuan. Aspirasi perempuan mengenai pembangunan kalurahan ditampung oleh PKK dan disalurkan melalui musyawarah kalurahan. Dengan begitu, seluruh kalangan masyarakat mengetahui dan dapat pula menggunakan maupun mengkaji pendapat perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Kalurahan Umbulharjo.

Ada banyak hal yang sudah dikerjakan oleh PKK di Kalurahan Umbulharjo, misalnya olahan makanan. Sebagaimana yang dikutip dari *Jogja.TribunNews* (13/07/2021), selama pandemi Covid-19, PKK di Kalurahan Umbulharjo mengelola jenis makanan seperti tape ketan dan aneka keripik. Makanan ini biasanya dijual di tempat-tempat wisata yang ada di Kapanewon Cangkringan. Menurut Endang, salah satu ibu PKK di Kalurahan Umbulharjo, makanan ini merupakan hasil bimbingan dari pelatihan membuat

makanan oleh PKK. Selain itu, PKK juga mengadakan kegiatan membatik dengan jenis Batik Jumpatan. Pelatihan itu digelar oleh Pemerintah Kalurahan Umbulharjo bersama PKK Kalurahan Umbulharjo. Kegiatan pelatihan membatik bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan keterampilan PKK Umbulharjo, terutama selama masa pandemi yang masih berlangsung saat ini.

Untuk mengoptimalkan tugas, fungsi dan peran PKK, Pemerintah Kalurahan dapat memberikan pembinaan yang juga didukung oleh kewenangan pemberdayaan masyarakat, karena inti kedua kewenangan ini adalah meningkatkan (*enhance*) dan menguatkan (*consolidate*) eksistensi masyarakat di segala lini kehidupan. Pemberian kewenangan kepada Pemerintah Kalurahan dilatari oleh argumen bahwa Pemerintah Kalurahanlah yang paling memahami kepentingan warganya. Pemerintah Kalurahan dapat mengatur keorganisasian dan mengurus PKK dengan memberikan penyadaran, pengkapasitasan, dan pengembangan agar lebih berdaya guna dan dapat menjadi mitra pemerintah dalam memberikan pelayanan.

Keberadaan PKK didukung penuh oleh Pemerintah Kalurahan Umbulharjo. Dukungan Pemerintah Kalurahan Umbulharjo tampak dalam pemberian akses kepada PKK untuk menyelenggarakan agenda pemberdayaan perempuan. Dalam rangka memperlancar kegiatan PKK, Pemerintah Kalurahan Umbulharjo juga mendistribusikan sumber daya (dana kegiatan, ruangan pertemuan, meubelair, dan honorarium kader).

Meskipun demikian, PKK belum menjadi wadah yang mampu memberdayakan kaum perempuan. Di dalam tubuh PKK itu sendiri masih

berlangsung praktik eksklusif (peminggiran) terhadap kaum perempuan. Praktik eksklusif ini tampak dalam kenyataan bahwa PKK tidak memberikan dukungan yang maksimal kepada kaum perempuan untuk mengartikulasikan kepentingannya. Akibatnya, kaum perempuan cenderung minder untuk mengartikulasikan kepentingannya pada saat musyawarah baik di tingkat padukuhan maupun tingkat kalurahan.

Selain itu, terdapat dua faktor yang menghambat keterlibatan PKK dalam pembangunan di Kalurahan Umbulharjo. Faktor-faktor tersebut antara lain: struktur budaya dan pandangan stereotip. Berkaitan dengan faktor struktur budaya, istri sering disebut sebagai *kanca wingking* (teman di dapur). Ungkapan ini mengartikan bahwa segala nasib dari perempuan tergantung pada suami. Pepatah Jawa lain yang sering muncul yaitu “*swarga nunut neraka katut*”. Pepatah ini mengandung arti bahwa kebahagiaan maupun penderitaan istri tergantung pada suami. Kebudayaan tersebut sangat mencerminkan minimnya kesempatan kepada perempuan untuk terlibat dalam pembangunan di desa. Berkaitan dengan pandangan stereotip, secara umum masyarakat masih menganggap bahwa tugas utama perempuan adalah mengurus rumah tangga. Stereotip ini menimbulkan kebiasaan hingga peraturan masyarakat yang memprioritaskan perempuan.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah penting dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kalurahan Umbulharjo dalam pembinaan dan pengembangan PKK? dan
2. Bagaimana PKK melakukan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan kaum di Kalurahan Umbulharjo?

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai obyek penelitian yang diangkat. Manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan yang tidak relevan.

Menurut Sugiyono (2007: 207), pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan. Fokus penelitian ini adalah Pemberdayaan Kaum Perempuan oleh Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus penelitian ini meliputi:

1. Kebijakan Pemerintah Kalurahan Umbulharjo dalam memfasilitasi kegiatan organisasi korporatis PKK;
2. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan melalui organisasi korporatis PKK;
3. Strategi pemberdayaan oleh PKK; dan
4. Kegagalan PKK dalam pemberdayaan di Kalurahan Umbulharjo.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan melalui PKK dan pemberdayaan PKK di Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan kebijakan Pemerintah Kalurahan Umbulharjo dalam memfasilitasi pembinaan dan pengembangan PKK;
2. Menjelaskan pengarusutamaan gender dalam pembangunan melalui organisasi korporatis PKK di Kalurahan Umbulharjo;
3. Menjelaskan strategi pemberdayaan oleh PKK; dan
4. Membongkar kegagalan PKK di Kalurahan Umbulharjo.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pengembangan studi-studi mengenai pemberdayaan perempuan dan lembaga kemasyarakatan PKK; dan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain yang berminat mengkaji tentang pemberdayaan perempuan dan lembaga kemasyarakatan PKK.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan umum kepada masyarakat tentang pemberdayaan perempuan dan lembaga kemasyarakatan PKK; dan Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kalurahan Umbulharjo guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kalurahan Umbulharjo.

## **F. Literature Review**

Penelitian ini akan membahas tentang pengarusutamaan gender yang diartikulasikan dalam pemberdayaan perempuan melalui organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Sejak awal kemunculannya, PKK dianggap sebagai wadah yang dapat menampung aspirasi masyarakat terutama kaum perempuan. Dengan begitu, seluruh kegiatan PKK diarahkan untuk menjadikan kaum perempuan sebagai individu ataupun kelompok yang berdaya dan mandiri. Singkatnya, PKK dipandang sebagai wadah yang mampu mendidik dan memberdayakan kaum perempuan guna mencapai kesetaraan gender, khususnya di desa.

Pada dasarnya, penelitian tentang pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh PKK bukanlah sesuatu yang baru. Penelitian-penelitian terdahulu yang mencoba mengungkap cara kerja PKK dalam pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian ini dilakukan oleh Bambang Nurdewanto, Eny Yuniriyanti, dan Ririn Sudarwati (2015) yang berjudul “*Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Dasa Wisma PKK*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan yang ditawarkan oleh PKK terdiri dari materi bekal keterampilan tentang konsep dasar kewirausahaan, pelatihan manajemen usaha, dan pembukuan sederhana serta materi praktik yang meliputi pelatihan pembuatan pupuk organik, pelatihan penanaman sayuran organik polybag, pelatihan produksi makanan olahan berbasis sayuran organik, dan pelatihan pembuatan kue.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Halimatu Sa'diah (2021) yang berjudul "*Pemberdayaan Perempuan Melalui Organisasi PKK di Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon*". Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan melalui organisasi PKK mempunyai peran yang signifikan dalam meningkatkan taraf kesejahteraan perempuan dan keluarga di Kelurahan Sunyaragi. Pemberdayaan perempuan melalui PKK di Kelurahan Sunyaragi berorientasi pada keagamaan dimandatkan kepada POKJA I, bidang peningkatan ekonomi dimandatkan kepada POKJA II, bidang tata laksana rumah tangga dimandatkan kepada POKJA III dan bidang kesehatan dimandatkan kepada POKJA IV. Ada berbagai faktor yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui organisasi PKK Kelurahan Sunyaragi, yaitu: masih banyaknya warga masyarakat yang ikut andil dalam menyukseskan setiap kegiatan yang dilakukan oleh PKK, motivasi tim penggerak PKK untuk terus aktif dan berkembang, dan tersedianya fasilitas yang dimiliki oleh Tim Penggerak PKK. Meskipun demikian, terdapat juga faktor yang menghambat pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui organisasi PKK, yaitu: terbatasnya Tim Penggerak PKK yang aktif, kaderisasi kepengurusan yang kurang optimal, dan terbatasnya dana penunjang operasional kegiatan PKK untuk melaksanakan kegiatan.

*Ketiga*, penelitian ini dilakukan oleh Nikmatul Laily Agustin, Slamet Muchsin, Roni Pindahanto Widodo (2019) yang berjudul "*Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan PKK Dalam Menangani Kesehatan Anak, Ibu Hamil, dan Lansia Sesuai Isi 10 Program Pokok PKK Di Kelurahan Kauman*,

*Kecamatan Klojen, Kota Malang*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa PKK berperan penting dalam penyelenggaraan posyandu. Eksistensi kader posyandu membawa dampak yang positif dalam menangani kesehatan. Masyarakat menganggap penting adanya program posyandu. Posyandu tersebut tidak hanya sekedar melaksanakan program formal dan rutinitas melainkan juga substansi yang besar bagi peningkatan kualitas kehidupan manusia. Meskipun demikian, pelaksanaan posyandu tetap menuai hambatan. Ada berbagai faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan posyandu yaitu lansia yang sudah lemah terkadang tidak memungkinkan untuk mengecek kesehatan dalam kegiatan posyandu, cuaca yang kadang tidak menentu, serta alat-alat yang masih kurang lengkap.

*Keempat*, penelitian ini dilakukan oleh Rizky Indrawati (2017) yang berjudul “*Strategi Pelaksanaan Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Samarinda Utara*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi PKK dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan cukup baik dan memberikan dampak yang positif dalam hal melaksanakan kegiatan dalam 10 program kerja PKK. Hal ini terlihat dari strategi pelaksanaan Tim PKK melibatkan masyarakat. Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan melalui beberapa tahapan yaitu: sosialisasi, fasilitasi, pemetan tempat, perencanaan, dan pelaksanaan.



*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Nikma Wahyuni Hanis dan Atika Marzaman (2019) yang berjudul “*Peran Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Telaga*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program PKK telah memberikan manfaat dalam pemberdayaan perempuan khususnya di Desa. Keberhasilan diperoleh berkat adanya dukungan pemerintah di tingkat kecamatan dan juga atas pembinaan langsung oleh pengurus PKK Kabupaten Gorontalo kepada PKK Kecamatan hingga desa. Meskipun demikian, program PKK belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal. Hal ini terjadi karena rendahnya kapasitas masyarakat khususnya perempuan terutama dalam penguasaan teknologi.

Secara umum, kelima penelitian di atas mengarahkan perhatian pada program PKK bagi kaum perempuan. Pada umumnya, penelitian terdahulu tentang PKK yang sangat menonjol adalah program yang berhubungan dengan urusan domestik dan ekonomi (terutama pendapatan rumah tangga). Namun, penelitian tentang program-program yang berkaitan dengan pangan, pakaian, dan tata kelola rumah tangga ini hanya semakin memberi penekanan bahwa istri adalah pendamping suami. Konsentrasi penelitian pada program-program tersebut semakin memperkuat anggapan bahwa urusan rumah tangga sebagai tanggung jawab perempuan. Meski berhasil menunjukkan tentang peran PKK dalam meningkatkan pendapatan dan berbagai wawasan keterampilan, tetapi peneliti terdahulu mengalami kealpaan dalam memberi wacana atau melakukan kajian tentang pentingnya partisipasi politik, khususnya tentang

pemahaman tentang hak-hak perempuan. Padahal penelitian semacam ini lebih diperlukan untuk memperbaiki posisi dan relasi perempuan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Perempuan bisa bicara politik dalam keluarga karena paham kebutuhan strategisnya sehingga mampu membuat keputusan-keputusan penting.

Berangkat dari kekurangan di atas, maka penelitian ini berusaha untuk melampaui penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu. Artinya, penelitian ini bukan saja berikhtiar untuk mengungkap strategi PKK dalam memberdayakan perempuan secara ekonomi (terutama pendapatan rumah tangga), tetapi penelitian ini juga berupaya untuk menjelaskan pengarusutamaan gender melalui organisasi PKK dan berupaya untuk membongkar kegagalan PKK dalam pemberdayaan perempuan di Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **G. Kerangka Konseptual**

Saat ini, pola dan bentuk pembangunan yang dikembangkan di desa adalah pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif menekankan keterlibatan semua elemen masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di desa. Pola pembangunan partisipatif ini menjamin keterlibatan aktif perempuan dalam pembangunan desa. Meskipun demikian, pada dasarnya, perempuan merupakan kaum marginal di desa. Ada kondisi struktural yang membuat perempuan termarginalisasi di desa. Misalnya, kebijakan pemerintah desa yang memprioritaskan aspek tertentu; sedikitnya akses perempuan terhadap proses pengambilan keputusan; dan kurangnya transparansi dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan. Nasib perempuan sebagai kelompok marginal ini dipengaruhi oleh sikap pejabat pemerintah, serta kebijakan dan program pembangunan di desa yang dinilai belum mampu menggapai kaum perempuan.

Dalam rangka mengkaji permasalahan ini, peneliti menggunakan persepektif keadilan gender dan emansipasi. Kemampuan perspektif keadilan gender dan emansipasi (pemberdayaan melalui organisasi) membantu perempuan melakukan refleksi dan analisis atas pengalaman hidup sehari-hari yang kemudian membimbing mereka untuk mengenali struktur lebih besar dan tak terlihat. Perspektif keadilan gender dan emansipasi (pemberdayaan) akan membantu kaum perempuan untuk melihat diri mereka sebagai pembuat sejarah, bukan hanya objek pasif dari proses bersejarah.

## 1. Konsep Governing

Pengertian dasar memerintah yaitu *Exercising Political Authority*, penggunaan otoritas politik yang dipegang oleh pemerintah. Pemerintahan adalah perbuatan pemerintah memerintah negara, masyarakat, pasar, warga, ekonomi, kehidupan sosial dan lain sebagainya. Pemerintahan adalah perbuatan pemerintah melakukan transformasi dari manusia menjadi rakyat, serta rakyat menjadi warga. Perbuatan memerintah mencakup fungsi, tindakan, proses dan cara. Konsep meso mikro *Governing* (G2) adalah terdiri dari reformasi, inovasi, proteksi, distribusi, provisi, alokasi, rekognisi, intervensi, imposisi, emansipasi, penetrasi, integrasi, privatisasi, represi, koersi dan lain sebagainya (Peta Penelitian Pemerintahan, 2020). Dengan demikian, memerintah tidak identik dengan perintah meski mengandung perintah.

Stephen Cook (2007), dalam bukunya yang berjudul "*Rulling but not Governing*" mengemukakan bahwa terdapat perbedaan memerintah dan menguasai (*governing dan rulling*). Gagasan ini muncul berangkat dari sejarah perkembangan Militer dan Politik di Mesir yang mana Militer mendominasi dinamika politik dan lini kehidupan masyarakat. Tetapi, kekuatan militer ini tidak menjadi pemerintah karena dia tidak memiliki kewenangan mengatur dan mengurus. Dengan demikian, dominasi kekuatan militer itu hanya berhenti pada tataran menguasai (*rulling*). Dalam hal ini *rulling* juga bisa dipahami sebagai kondisi yang tidak menjadi pemerintah dalam artian tidak mengatur dan mengurus.

Ada juga beberapa literatur yang menganggap bahwa antara *rulling* dan *governing* berbeda. *Rulling* bisa dilakukan oleh siapapun. *Rulling* mempunyai makna menguasai dan mempunyai unsur dominasi. Sementara itu, secara ideal normatif, *governing* melekat pada pemerintah dan mempunyai otoritas dan menjadi sebuah legitimasi untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dalam pengertian dasar, memerintah adalah penggunaan otoritas politik yang dipegang oleh pemerintah.

*Governing* diartikan sebagai sebuah kata kerja yang memerintah dimana kata memerintah tidak lazim digunakan dalam kosakata pemerintahan. Kata yang lazim digunakan dalam pemerintahan adalah menyelenggarakan pemerintahan. Menyelenggarakan pemerintahan berarti ada otoritas yang mengatur dan mengurus. Otoritas tersebut adalah tradisi atau pengaruh dari Belanda yang sangat kuat, yakni mengatur dan mengurus di mana perbuatan hukum dan administrasi mengabaikan perbuatan politik. *Governing* memiliki padanan kata yang banyak sehingga sulit untuk dipahami, tetapi dalam pengertian bahasa Indonesia kata baku dari *governing* adalah mengatur dan mengurus. Padanan kata *governing* dalam keilmuan perlu dilakukan sebuah perbandingan dimana perlu dibandingkan dengan konsep-konsep kunci yang harus diadaptasi, misalnya: konsep *rulling* (menguasai), konsep *governing* (mengatur dan mengurus), konsep *ordering* (menata atau menciptakan) dan konsep *stiring* (mengarahkan).

Para ilmuwan politik lebih menyukai *rulling* dari pada *governing* misalnya ilmuwan Amerika Serikat seperti Robert Dahl. Dahl sebagai ilmuwan politik, tetapi kajiannya lebih dekat dengan politik dalam pengertian pemerintahan, yang pada, yang pada tahun 1961 menulis “*Who Govern*” atau “siapa yang memerintah”. Dahl berbicara pada otoritas atau pada kewenangan politik yang sudah dilembagakan dalam institusi pemerintahan. William Damhoff (1967) lebih menyukai konsep *Rule* yang dalam bukunya menulis “*Who Rule*” (siapa yang menguasai). Ia memiliki perspektif keluar dari institusi pemerintahan, tetapi perlu diperhatikan bahwa ada kekuatan diluar institusi pemerintahan.

Konsep *governing* yang dipahami sebagai upaya untuk mengatur dan mengurus harus memiliki proses, fungsi dan hasil. *Governing* mengandung proses politik, hukum dan administrasi. Pembentukan hukum dan kebijakan adalah perbuatan penting pemerintah dalam *governing*. Gagasan ideal dalam konteks ini adalah fungsi ekstraksi, distribusi, proteksi dan koersi yang dijalankan pemerintah atas negara, warga dan masyarakat.

Fokus utama *governing* sebagai basis konsep identitas mengandung proses politik, hukum dan administrasi. Sebab politik adalah sebuah kegiatan membuat keputusan dan hukum dan administrasi adalah sebagai bentuk teknis eksekusi dari hukum atau keputusan tersebut. Membicarakan konsep *governing* tidak terlepas dari Kebijakan adalah tindakan utama pemerintah fungsi pemerintahan adalah *protecting* atau

melindungi bukan hanya *promoting*. Fungsi memerintah yang dijalankan pemerintah yang paling utama adalah *protecting* untuk *law and order* serta *distributing* untuk *welfare* (kesejahteraan). Pemerintahan mencakup proses politik, hukum, dan administrasi yang didukung dengan teknik. Pemerintahan juga mencakup proses *connecting*, *crafting* dan *transforming* terhadap unsur-unsur berbeda untuk melahirkan kebijakan, hukum, dan lain sebagainya.

Kebijakan merupakan jantung pemerintahan dan perbuatan pemerintah dalam memerintah dan dalam Ilmu Pemerintahan berbicara kebijakan dari hulu sampai hilir serta secara komprehensif berbicara konteks, kontestasi, konstitutif, konten, konsistensi, dan konsekuensi. Bahkan bisa juga bicara soal kontradiksi kebijakan. Governing adalah arena kontestasi sehingga dibutuhkan pemerintah yang kuat, berdaulat dan demokratis dan tidak diintervensi oleh elit, dan pihak lainnya tetapi lebih tegak lurus dan secara *responsible* mempertanggungjawabkan fungsi perlindungan (*protecting*) dan pendistribusian (*distributing*) untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (Sutoro Eko, 2021: 12-14).

Dalam kaitannya dengan konsep *governing* ini, maka perbuatan pemerintah Kalurahan Umbulharjo dalam memperkuat keberadaan lembaga kemasyarakatan PKK, dapat dilakukan melalui:

### 1) *Governing* (Mengatur dan Mengurus)

Mengatur dan mengurus yang dimaksud dalam konteks ini adalah peran pemerintah kalurahan mengakomodasi kebutuhan dan *demand* (tuntutan) PKK dengan menyesuaikan potensi yang ada. Sebagai aktor yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan (*policy making*) maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengkonsolidasi atau menyatukan visi misi karang taruna agar tidak bergerak sendiri serta melakukan penguatan yang tepat melalui pembinaan dan pemberdayaan seperti yang diamanatkan oleh UU Desa Nomor 6 Tahun 2014.

RPJMKal merupakan *master plan* pembangunan kalurahan dalam 6 tahun masa jabatan. Perumusan RPJMKal dilakukan melalui musyawarah rencana pembangunan kalurahan. Ruang tersebut dapat digunakan oleh PKK sebagai panggung demokrasi untuk memberikan gagasan, identifikasi masalah dan potensi. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan informasi dan konsep ideal tentang pemberdayaan masyarakat di kalurahan khususnya pemberdayaan perempuan.

Dukungan yang dapat diberikan Pemerintah Kalurahan kepada PKK adalah memberikan legal formal atau kepengaturan yang jelas dalam RPJMKal. RPJMKal tersebut



pada gilirannya ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan. Peraturan Kalurahan tersebut berisi berbagai pengaturan tentang dinamika kalurahan serta dana yang akan dialokasikan kepada PKK.

2) *Ordering* (menata atau menciptakan)

Salah satu point dalam studi *governing* adalah *ordering* yaitu sebuah proses penataan dan penciptaan. Karena itu inovasi Pemerintah Kalurahan sangat diperlukan agar tidak adanya kompetisi yang tidak sehat antar lembaga kemasyarakatan dengan menciptakan ruang komunikasi antar lembaga kemasyarakatan dan memberikan kesempatan belajar yang luas untuk pengembangan potensi diri dan kemajuan organisasi.

3) *Stiring* (mengarahkan)

Sebagai organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, maka penting adanya pengarahan yang jelas dan substantif kepada PKK. Hal ini bertujuan agar keberdaan PKK memiliki manfaat berkelanjutan bagi masyarakat khususnya kaum perempuan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, hingga pendampingan kepada PKK. Pembinaan ini diharapkan dapat memberikan *output* dan *outcome* bagi masyarakat maupun PKK itu sendiri.

## **2. Konsep Gender Untuk Kesejahteraan Perempuan dalam Pembangunan**

Kata “gender” berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti “*grouping of nouns and pronouns into masculine, feminine, and neuter*” (kumpulan kata benda atau kata ganti berkaitan dengan maskulin, feminim, dan kata ganti yang bersifat netral). Meskipun kata gender belum masuk dalam perbendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah tersebut sudah lazim digunakan. Gender dijadikan sebagai “interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan”. Gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.

Dalam bukunya yang berjudul “*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*”, Mansoer Faqih mendefenisikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara, laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan hal-hal yang dapat dipertukarkan. Artinya, ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa.

Kata gender berbeda dengan kata seks (jenis kelamin). Seks (jenis kelamin) merupakan persifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yaitu laki-laki dan perempuan. Manusia

berjenis kelamin laki-laki memiliki penis, jakala, dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan adalah manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut melekat pada laki-laki atau perempuan dan secara biologis tidak bisa dipertukarkan. Secara permanen, pembagian tersebut tidak bisa berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering disebut sebagai ketentuan kodrat.

Selanjutnya ada kaitan erat antara perbedaan gender (*gender difference*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dalam struktur ketidakadilan masyarakat secara luas. Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Terbentuknya perbedaan gender disebabkan oleh banyak hal, misalnya, dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, dan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses panjang sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan kodrat, seolah-olah bersifat biologis, yang tidak bisa diubah lagi. Padahal, sesungguhnya sifat-sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat, bukan kodrat.

Karena konstruksi sosial gender, kaum laki-laki harus bersifat kuat dan agresif. Kaum laki-laki harus terlatih dan tersosialisasi serta termotivasi untuk menuju sifat gender yang ditentukan oleh masyarakat, yaitu secara fisik lebih kuat dan besar. Sementara itu, urusan mendidik anak,

mengelola atau merawat kebersihan dan keindahan rumah dianggap sebagai “kodrat” perempuan. Padahal, hal tersebut sebenarnya adalah konstruksi sosial dan kultural terhadap kaum perempuan. Kenyataannya, urusan tersebut bukan kodrat karena dapat dilakukan atau dipertukarkan dengan kaum laki-laki.

Perbedaan gender tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan publik, pembentukan stereotipe (pelabelan negatif), kekerasan, beban kerja yang lebih panjang dan lebih banyak, serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Marginalisasi (pemiskinan) perempuan dapat bersumber dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi, kebiasaan, bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Contoh marginalisasi yang bersumber dari kebijakan pemerintah adalah penggantian penanaman jenis padi batang pendek dengan padi batang panjang. Tanpa disadari, penanaman jenis padi batang panjang menyingkirkan perempuan sebagai pemanen padi yang menggunakan ani-ani. Marginalisasi perempuan yang bersumber dari tradisi terlihat dari adanya suku yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan atau adanya agama/keyakinan yang memberikan perempuan setengah dari hak waris yang dapat diberikan kepada laki-laki.

Pandangan gender bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Bahwa perempuan irasional dan emosional menyebabkan perempuan tidak bisa tampil memimpin, menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting, perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi, termasuk perempuan bisa pindah dengan alasan ikut suami, tetapi tidak sebaliknya.

Jenis-jenis ketidakadilan gender tersebut telah terjadi di berbagai tingkatan: kebijakan, adat/kultur/agama, dan rumah tangga. Yang paling sulit diubah adalah ketidakadilan gender telah mengakar ke dalam keyakinan dan menjadi ideologi perempuan ataupun laki-laki. Semua bentuk ketidakadilan gender tersebut tersosialisasi secara mantap sehingga laki-laki dan perempuan akhirnya mempercayai bahwa peran gender tersebut seolah-olah merupakan kodrat. Lambat laun terciptalah suatu struktur ketidakadilan gender yang diterima dan tidak dapat lagi dirasakan sebagai sesuatu yang salah.

Memperjuangkan keadilan gender merupakan tugas berat karena melibatkan manusia secara emosional, keyakinan, bahkan sampai pada urusan negara. Solusi tentang masalah gender dapat dilakukan melalui upaya jangka pendek dan jangka panjang. Upaya jangka pendek difokuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis ketidakadilan gender. Sementara usaha jangka panjang adalah upaya untuk menemukan cara strategis dalam rangka memerangi ketidakadilan.

Upaya-upaya jangka pendek dapat dilakukan melalui program-program aksi yang melibatkan perempuan agar mampu mengatasi masalahnya sendiri. Misalnya, dalam mengatasi marginalisasi, perempuan harus terlibat dalam program pengembangan masyarakat. Untuk mengatasi masalah subordinasi, perempuan harus aktif mengikuti setiap jenjang pendidikan dan mengaktifkan berbagai organisasi atau kelompok perempuan. Untuk mengatasi masalah kekerasan, pelecehan, dan berbagai stereotipe terhadap kaum perempuan, perempuan sendiri harus mulai memberikan penolakan secara tegas kepada mereka yang melakukan kekerasan dan pelecehan agar tindakan-tindakan tersebut berhenti. Membiarkan tindakan tersebut akan mendorong pelaku untuk melanggengkannya. Pelaku kekerasan seksual harus dilaporkan dan dihukum. Kampanye antikekerasan dan antipelecehan terhadap perempuan perlu dimasyarakatkan secara luas.

Upaya jangka panjang dapat dilakukan melalui kampanye kesadaran kritis dan pendidikan umum masyarakat untuk menghentikan berbagai bentuk ketidakadilan gender. Upaya pendukungnya adalah melalui studi tentang berbagai ketidakadilan gender dan manifestasinya, baik di masyarakat, negara, maupun di dalam rumah tangga. Hasil kajian tersebut dapat dipakai untuk melakukan advokasi guna mencapai perubahan kebijakan, hukum, dan aturan pemerintah yang dinilai tidak adil terhadap kaum perempuan.

### 3. Konsep Pemberdayaan Perempuan

Secara sederhana, pemberdayaan perempuan merupakan pendekatan yang memusatkan perhatian pada upaya penghapusan subordinasi perempuan. Hal ini berarti bahwa terdapat tuntutan untuk kesamaan hak ekonomi, hak-hak resmi yang tidak diskriminatif, dan hak-hak reproduksi untuk dimasukkan di dalam setiap agenda pembicaraan publik. Jadi, pemberdayaan perempuan merupakan upaya memperbaiki posisi perempuan yang berlandaskan pada upaya-upaya penghapusan subordinasi perempuan.

Dalam konteks pemberdayaan perempuan, terdapat lima tingkat pemerataan, yaitu: *Pertama*, pemerataan tingkat kesejahteraan. Kalau pada awal, kelompok ini ingin diberdayakan tetapi tidak punya aset terhadap ekonomi, tidak punya peluang pada upaya meningkatkan kemampuannya di dalam perekonomian, tidak sejahtera, maka tentu tidak mungkin kita bisa mengangkat mereka dari penderitaannya.

*Kedua*, pemerataan akses. Pemerataan akses yaitu meningkatkan kemampuan perempuan masuk ke sektor-sektor untuk mendapatkan informasi, mendapatkan kesempatan bekerja, mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik yang sama kedudukannya dengan laki-laki. Kalau akses itu sudah diperoleh, maka langkah berikutnya adalah bagaimana meningkatkan kesadaran.

*Ketiga*, pemerataan kesadaran. Kalau kesadaran itu muncul, maka diharapkan kaum perempuan itu bisa memperbaiki sendiri apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan gender perempuan ini. Setelah penyadaran diperoleh, maka tingkat berikutnya adalah peningkatan dan pemerataan partisipasi aktif.

*Keempat*, pemerataan partisipasi. Perempuan tidak lagi dianggap sebagai objek dari pembangunan tetapi ikut serta melakukan perencanaan, ikut serta melaksanakan dan ikut serta mengevaluasi program-program yang ditimpakan padanya.

*Kelima*, pemerataan penguasaan. Pemerataan penguasaan yaitu di mana partisipasi perempuan pada tingkat keputusan ini tentunya memberikan dampak pada pemberdayaan dan apabila partisipasi ini digunakan, maka akses mereka terhadap sumber-sumber ekonomi akan menjadi lebih baik serta menjamin pemerataan terhadap akses sumber dan pembagian manfaat. Kontrol atau penguasaan perempuan terhadap pengambilan keputusan ini seringkali mengalami hambatan bukan karena masalah-masalah yang berkaitan dengan ketidakmampuan perempuan itu mengambil keputusan, tetapi hegemoni budaya seringkali menempatkan perempuan sebagai pengambil keputusan (Saptandari, 1999: 35-36).

Menurut Jim Ife (2008: 510), terdapat tiga strategi dalam mencapai pemberdayaan, yaitu: *Pertama*, pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan. Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan dicapai dengan mengembangkan struktur-struktur dan lembaga untuk mewujudkan



akses yang lebih adil kepada sumber daya atau berbagai layanan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Menggunakan kebijakan ekonomi untuk mengurangi pengangguran dapat dilihat sebagai pemberdayaan dalam konteks bahwa hal ini meningkatkan sumber daya, akses, dan kesempatan bagi masyarakat. Memberikan sumber daya yang cukup dan aman kepada rakyat juga merupakan strategi pemberdayaan yang penting.

*Kedua*, pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik menekankan pentingnya perjuangan dan perubahan politik dalam meningkatkan kekuasaan yang efektif. Tetapi, ia menekankan pendekatan aktivis dan berupaya untuk memungkinkan masyarakat meningkatkann kekuasaannya melalui bentuk aksi langsung atau dengan memperlengkapi mereka agar lebih efektif dalam arena politik.

*Ketiga*, pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadaran. Pendidikan dan penyadaran menekankan pentingnya suatu proses edukatif dalam melengkapi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan mereka. Hal ini berarti bahwa memasukan gagasan-gagasan peningkatan kesadaran, membantu masyarakat memahami struktur operasi, memberikan masyarakat kosakata dan keterampilan untuk bekerja menuju perubahan yang efektif dan seterusnya.

Adapun model pemberdayaan PKK, yaitu: *Pertama*, penyadaran. Sasaran pemberdayaan adalah kaum perempuan sebagai masyarakat yang kurang mampu karena mengalami eksklusi dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, organisasi PKK memberikan pencerahan dengan menyadarkan bahwa kaum perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dan mampu menghadapi masalahnya sendiri. Organisasi PKK harus memberikan motivasi kepada kaum perempuan bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

*Kedua*, pengkapasitasan. Pengkapasitasan terdiri dari tiga jenis yaitu pengkapasitasan manusia, organisasi, dan sistem nilai. Pengkapasitasan manusia dilakukan dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan keterampilan individu atau kelompok. Pengkapasitasan organisasi dilakukan dengan restrukturisasi organisasi sehingga dapat memunculkan inovasi baru dalam perubahan yang dilakukan. Pengkapasitasan sistem nilai dilakukan dengan membuat “aturan main” di dalam organisasi yang berupa peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya.

*Ketiga*, pendayaan. Pendayaan dilakukan dengan memberikan daya atau kekuatan, kekuasaan, otoritas atau peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki sehingga kaum perempuan dapat menjalankan kekuasaan yang diberikan dan mampu membawa perubahan yang lebih baik (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007).

#### **4. Konsep Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)**

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang sudah begitu melembaga baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa. Bahkan kemudian PKK dengan kegiatannya telah merambah hingga ke tingkat dusun dan RT. Agar pengelolaannya efektif, dibentuklah Tim Pembina (TP) PKK di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Tim Pembina PKK bergungsi untuk mengakomodir dan memfasilitasi berbagai kegiatan dalam rangka menunjang berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing (Indarwati, 2017: 864).

Pada awalnya, organisasi ini diberi nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang di dalamnya menekankan partisipasi perempuan dan merupakan program pendidikan perempuan. Namun, seiring berjalannya waktu, organisasi ini berubah nama menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Perubahan nama ini dilandasi oleh pemikiran bahwa organisasi ini tidak hanya mendidik kaum perempuan, akan tetapi membina serta membangun keluarga di bidang mental, spiritual, fisik, dan material serta peningkatan sandang, papan, kesehatan, serta mutu dan juga keluarga sejahtera (Haniz dan Marzaman, 2019: 124).

Di sisi programnya, pada awalnya organisasi PKK diarahkan untuk mendorong kemajuan kaum perempuan agar bisa memainkan peran gandanya secara baik, yakni sebagai pengelola keuangan dalam keluarga dan bisa mencari nafkah serta sebagai pelaku pembangunan. Akan tetapi,

dalam perkembangannya, pemberdayaan perempuan berkembang juga dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berdesa, berbangsa, dan bernegara. Pemberdayaan perempuan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan perempuan supaya melaksanakan fungsi dan perannya dengan baik. Selain itu, PKK diharapkan mampu membebaskan perempuan dari budaya patriarki. Dengan demikian, PKK diharapkan mampu untuk menghadirkan kemandirian serta mengangkat harkat dan martabat perempuan sebagai bagian dari keluarga (Pontoh, 2013).

Bergulirnya Reformasi dan disahkannya GBHN pada tahun 1999 oleh MPR serta adanya paradigma baru pembangunan dan semangat Otonomi Daerah, maka kepanjangan PKK kembali berubah menjadi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Dengan perubahan kepanjangan ini, maka tujuan PKK juga berubah. PKK sebagai organisasi yang melibatkan perempuan dan keluarga mempunyai tujuan utama yaitu mewujudkan kesejahteraan keluarga. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. Jika kesejahteraan keluarga terwudud, maka akan lahir ketenteraman, kedamaian, dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, kesejahteraan keluarga merupakan salah satu tolok ukur pembangunan.

Gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang kemudian disingkat gerakan PKK merupakan gerakan nasional yang berorientasi pada pembangunan masyarakat. Gerakan pembangunan masyarakat ini

dimulai dari bawah (dari, oleh, dan untuk rakyat) demi terwujudnya keluarga yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju, serta mandiri, memiliki kesadaran akan kesetaraan gender, kesadaran hukum dan lingkungan (Permendagri Nomo1 1 Tahun 2013 Bab 1, Pasal 1, Ayat 5). Ini berarti bahwa organisasi PKK memiliki tugas untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat terutama kaum perempuan.

Dengan mengacu pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 di atas, dapat diketahui bahwa ruang lingkup kewenangan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) bisa terbilang cukup luas. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PKK menysasar pada keluarga di pedesaan yang kemudian ditingkatkan dan dikembangkan lagi pada kemampuan mental, spiritual, fisik, dan material. Jadi, pada dasarnya organisasi PKK merupakan organisasi yang dibentuk untuk mendukung dan membantu program-program pemerintah. Bentuk dukungan dan bantuan itu berupa menyuplai data berberapa aspek yang diperlukan seperti data warga, data ibu hamil, bayi, balita, kelahiran, kematian sampai pada kegiatan masyarakat (Hanis dan Marzaman, 2019: 125).

Penelitian ini mengarahkan perhatian pada upaya pengarusutamaan gender melalui pengakuan akan hak politik, ekonomi, sosial kaum perempuan. Penelitian ini hendak mengungkap pengarusutamaan gender melalui pemerataan suara (*voice*), akses (*access*), dan kontrol (*control*) terhadap perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan desa. Singkatnya, penelitian ini memfokuskan diri pada pemberdayaan perempuan melalui pengorganisasian.

Pengorganisasian perempuan merupakan salah satu upaya jangka pendek untuk melawan ketidakadilan gender. Pengorganisasian dianggap sebagai langkah paling konkret untuk memberdayakan perempuan secara lebih baik. Pengorganisasian perempuan merupakan satu langkah pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa. Salah satu organisasi perempuan yang diyakini dapat meningkatkan partisipasi perempuan di desa adalah organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dengan begitu, penelitian ini memusatkan perhatian pada pengorganisasian perempuan melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga merupakan suatu wadah yang dibentuk untuk mengakomodasi kaum perempuan sehingga memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam pembangunan desa. Selain itu, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga merupakan bentuk perkumpulan ibu-ibu untuk menampung aspirasi kaum perempuan. Singkatnya, organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga merupakan wadah untuk meningkatkan posisi tawar perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Meskipun begitu, penelitian ini hendaknya tidak dipahami sebagai upaya untuk mengkultuskan PKK. Sebab dalam praktiknya PKK masih mempunyai banyak kekurangan dan kendala. Oleh karena itu, penelitian

ini juga berikhtiar untuk membongkar kegagalan PKK dalam melakukan pemberdayaan kaum perempuan di desa.

Ada beberapa hal yang dapat menjadi pijakan dalam melihat kegagalan PKK, yaitu: *Pertama*, struktur organisasi. PKK, dari dulu hingga sekarang tetap eksis, sebagai organisasi korporatis yang hierarkis dari tim penggerak PKK Pusat yang dipimpin oleh Istri Menteri Dalam Negeri, kemudian turun ke PKK Provinsi yang dipimpin oleh istri Gubernur, PKK Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Istri Bupati/Wali Kota, PKK Kecamatan yang dipimpin oleh Istri Camat, dan sampai PKK Desa yang dipimpin oleh Istri Kepala Desa. Dengan demikian, jabatan ketua dalam organisasi PKK merupakan sesuatu yang terberi bukan melalui suatu proses demokratis, yaitu musyawarah anggota.

*Kedua*, lemahnya modal sosial. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan salah satu institusi korporatis yang masih eksis di desa. Sebagai institusi korporatis, PKK memang memiliki jembatan sosial (*social bridging*) yang inklusif, yakni melampaui batas-batas agama, suku, dan kerabat. Namun, institusi korporatis tetap eksklusif secara vertikal, yakni melakukan eksklusi terhadap kaum perempuan, kaum miskin, dan kaum marginal lainnya. Institusi korporatis juga miskin jaringan sosial yang berorientasi keluar (*outward looking*) (Sutoro Eko, 2015: 82-83).

*Ketiga*, bergantung pada pemerintah. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh negara

secara seragam pada masa Orde Baru hingga sekarang. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dibentuk untuk mewadahi kegiatan kaum perempuan. Sebagai insitusi korporatis, nilai-nilai yang terkandung dalam institusi korporatis adalah harmoni dan partisipasi. Secara umum, PKK mempunyai tiga tujuan, yaitu: (1) kontrol dan kanalisasi kepentingan masyarakat secara tunggal dan seragam; (2) sebagai wadah pemberdayaan dan partisipasi; serta (3) untuk melayani program-program pemerintah serta mengambil dan memanfaatkan dana (BLM) dari pemerintah.

Sementara itu, PKK mempunyai tiga fungsi, yaitu: (a) sebagai alat kontrol negara terhadap berbagai segmen masyarakat; (b) sebagai kepanjangan tangan negara untuk melayani masyarakat karena keterbatasan kemampuan negara; dan (c) sebagai wadah penyaluran kepentingan dan aktivitas berbagai segmen masyarakat. Dengan demikian, institusi-institusi ini menjadi penerima manfaat dari program pemerintah (Sutoro Eko, 2015: 82-83).

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa PKK merupakan bagian dari birokrasi negara yang masuk sampai ke ranah desa. Sebagai organisasi bentukan negara, maka PKK juga memakai konsep negara menggerakkan pembangunan (*state driven development*) dalam pembangunan desa. Konsep pembangunan seperti ini pada gilirannya akan menghancurkan desa sebagai entitas lokal yang berdaulat. Selain itu, sebagai organisasi bentukan negara, maka PKK memiliki ketergantungan



yang tinggi pada pemerintah. Sebab pada dasarnya PKK merupakan institusi penerima manfaat dari program pemerintah.

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alami (natural) dan peneliti menjadi instrumen kunci serta hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna dari yang diteliti dari pada mengeneralisasikan obyek penelitian (Sugiyono, 2007).

Metode penelitian kualitatif lebih mudah menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan, lebih peka terhadap perubahan pola/nilai dan bahkan data yang ada di lapangan (Moleong, 2002: 5).

### **1. Jenis Penelitian**

Untuk mengungkapkan fenomena sosial secara jelas dan cermat, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang nampak. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif cenderung menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan induktif. Pemanfaatan teori-teori yang relevan sebagai pisau analisis data kualitatif menghasilkan deskripsi yang berbobot yang maknanya mendalam (Tim Penyusun, 2011: 25).

## **2. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut Spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activities*) (Sugiyono, 2015: 229).

Fokus penelitian ini adalah Pemberdayaan Kaum Perempuan oleh Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Unsur masyarakat yang bertugas untuk melaksanakan pemberdayaan kaum perempuan adalah organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Dengan demikian objek penelitiannya adalah organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga serta segala usahanya dalam memberikan pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan bagi kaum perempuan di Kalurahan Umbulharjo.

## **3. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari Pemerintah Kalurahan Umbulharjo, pengurus dan anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan tokoh masyarakat di Kalurahan Umbulharjo. Subyek penelitian ini dipilih karena berhubungan dengan obyek penelitian dan diharapkan mampu memberikan data dan informasi sesuai dengan permasalahan penelitian.

Subyek penelitian merupakan informan dalam penelitian ini. Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Teknik penentuan informan yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan teknik *purposive*, yaitu teknik penentuan informan yang didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang betul-betul dipilih memiliki kriteria sebagai informan). Informan ini dibutuhkan untuk mengetahui kondisi yang sesuai dengan pemberdayaan kaum perempuan oleh organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kalurahan Umbulharjo. Adapun iniforman dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari:

- 1) Kamituwa Kalurahan Umbulharjo;
- 2) Ketua dan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (7 orang);
- 3) Masyarakat Kalurahan (2 orang).

**Tabel 1.1 Profil Subyek Penelitian**

| No | Nama           | Jenis Kelamin | Usia (Tahun) | Pendidikan | Status          |
|----|----------------|---------------|--------------|------------|-----------------|
| 1  | Sri Wahyuni    | Perempuan     | 40           | Strata 1   | Ketua PKK       |
| 2  | Fitri Eryanti  | Perempuan     | 35           | Strata 1   | Bendahara PKK   |
| 3  | Sriyono        | Laki-laki     | 40           | Strata 1   | Masyarakat      |
| 4  | Suyatmi        | Perempuan     | 50           | SMA        | Masyarakat      |
| 5  | Misman         | Laki-laki     | 55           | Strata 1   | Kamituwa        |
| 6  | Maryanti       | Perempuan     | 42           | SMA        | Ketua Pokja IV  |
| 7  | Sriyami        | Perempuan     | 40           | SMA        | Kader Posyandu  |
| 8  | Sri Lestari    | Perempuan     | 45           | Strata 1   | Anggota PKK     |
| 9  | Nuryanti       | Perempuan     | 38           | Strata 1   | Ketua Pokja I   |
| 10 | Dian Anggraini | Perempuan     | 35           | Strata 1   | Wakil Ketua PKK |

*Sumber: Hasil Wawancara Peneliti*

## **5. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi ini dipilih karena di lokasi ini pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga belum terlaksana dengan maksimal. Hal tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian di wilayah tersebut. Penelitian ini akan dilakukan selama tiga bulan yaitu bulan Desember 2021 sampai bulan Februari 2022.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Burhan Bungin mengemukakan bahwa metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Dalam hal ini diperlukan adanya teknik pengumpulan data yang dapat digunakan secara cepat dan tepat serta sesuai dengan masalah yang akan diselidiki. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

### **a) Studi Pustaka (*Library Research*)**

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka dengan cara membaca, mencatat, menelaah, menganalisis, dan mengolah data agar menghasilkan

penelitian yang baru. Dengan demikian, studi pustaka adalah suatu perlakuan (tindakan) dalam melaksanakan penelitian yang menggunakan berbagai sumber kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data/informasi yang diinginkan (Zed, 2008: 3).

Dalam penelitian ini, peneliti memulai pengumpulan data dengan cara mencatat, menelaah, dan menganalisis berbagai informasi yang bersumber dari buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

#### **b) Observasi (Pengamatan)**

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap obyek dan subyek penelitian secara saksama dengan menggunakan seluruh alat indera. Melalui observasi, peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku itu sendiri (Arikuntoro, 1998: 146).

Penelitian ini menggunakan observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur adalah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi. Dengan demikian, peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan (Bungin, 2007: 115-117).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan lima (5) kali observasi. Dari observasi tersebut, peneliti memperoleh pengetahuan tentang program pembangunan, keadaan wilayah yaitu terkait potensi wilayah baik potensi fisik maupun non-fisik dan masalah dan kendala di lokasi penelitian serta dinamika organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kalurahan Umbulharjo.

**c) Wawancara**

Penelitian ini mengombinasikan dua jenis wawancara yaitu wawancara mendalam dan wawancara terarah. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasanaannya hidup, dan dilakukan berkali-kali. Sedangkan wawancara terarah (*guide interview*) adalah peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya (Mudjia, 2011: 2).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung di lokasi penelitian dengan informan (subyek penelitian). Meskipun demikian, peneliti tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Hasil

wawancara dengan informan merupakan data primer dalam penelitian ini.

#### **d) Dokumentasi**

Selain melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara, informasi atau data juga dapat diperoleh lewat dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental (Sugiyono, 2007: 240). Dengan kalimat lain, dokumentasi adalah fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, profil daerah, dan sebagainya. Dokumentasi seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Data sekunder ini diperlukan guna melengkapi data primer (observasi dan wawancara) yang telah diperoleh. Selain itu, dokumentasi juga dapat menggunakan dokumentasi visual hasil observasi peneliti di lapangan. Oleh karena itu, peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumentasi tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna (Mudija, 2011: 3).

Dalam penelitian ini, peneliti mendokumentasikan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama

yang diperoleh dari informan yaitu hasil wawancara dengan informan. Hasil wawancara ini ditulis dan direkam guna untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Sementara itu, data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Data sekunder yang diperoleh peneliti yaitu berupa dokumen profil Kalurahan Umbulharjo, profil organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan berita yang ditulis oleh jurnalis dalam majalah atau surat kabar.

## **7. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada analisis data lapangan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman tentang interaktif model yang menghasilkan analisis data ke dalam tahap-tahap sebagai berikut:

### **a) Pengumpulan Data**

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek yaitu deskripsi dan refleksi. Deskripsi berisi apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti. Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan, komentar, tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai.



### **b) Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

### **c) Penyajian Data**

Penyajian data merupakan hasil reduksi yang disajikan dalam laporan secara sistematis yang mudah dibaca atau dipahami baik sebagai keseluruhan maupun bagian-bagiannya dalam konteks sebagai satu kesatuan (Miles dan Huberman, 1992: 16-20).

## **8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam penelitian diperlukan teknik pemeriksaan keabsahan data. Sedangkann untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan beberapa teknik seperti *persistent obsevation* (observasi berlanjut), *trianggulasi*, maupun *peerderieting* (pemeriksaan sejawat melalui diskusi) (Moleong, 2012: 330).

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan *triangulasi* yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu sendiri. Adapun langkah operasionalnya dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan (obesrvasi) dengan data hasil wawancara;
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang penelitian; dan
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang dari berbagai kalangan seperti orang biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan.

## **BAB II**

### **PROFIL KALURAHAN UMBULHARJO DAN PKK**

#### **A. Profil Kalurahan Umbulharjo**

##### **1. Sejarah Kalurahan**

Dahulu, Kalurahan Umbulharjo bernama Pentingsari. Di sana terdapat “umbul” atau mata air yang besar sehingga dapat memenuhi kebutuhan air di kalurahan tersebut dan wilayah sekitarnya. Wilayah tersebut kemudian dinamakan “umbulharjo”. Secara harafiah, nama Umbulharjo terdiri dari “Umbul” yang artinya mata air dan “Harjo” (raharjo) yang artinya makmur atau tenteram. Dengan begitu, masyarakat diharapkan akan menjadi makmur dan tenteram.

Terjadinya Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman berdasarkan maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1946 yang secara resmi ditetapkan berdasarkan Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 Tentang Perubahan Daerah-Daerah Kalurahan.

## 2. Letak Geografis

Kalurahan Umbulharjo terletak di lereng Gunung Merapi dengan luas 826 Ha. Kalurahan Umbulharjo terbagi menjadi 9 padukuhan, 20 RW, 40 RT, dan 71 Dasawisma. Kalurahan Umbulharjo berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut:

**Tabel 2.1 Batas Wilayah Kalurahan Umbulharjo**

| No | Batas           | Wilayah                            |
|----|-----------------|------------------------------------|
| 1  | Sebelah Utara   | Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali |
| 2  | Sebelah Selatan | Kalurahan Wukirsari, Cangkringan   |
| 3  | Sebelah Barat   | Kalurahan Hargobinangun, Pakem     |
| 4  | Sebelah Timur   | Kalurahan Kepuharjo, Cangkringan   |

*Sumber: Profil Kalurahan Umbulharjo Tahun 2022*

Data ini menunjukkan bahwa letak Kalurahan Umbulharjo boleh dibilang sangat strategis karena berada di antara keempat kalurahan lain. Dengan kenyataan ini, maka Kalurahan Umbulharjo dapat melakukan kerjasama antarkalurahan untuk mengembangkan pembangunan kawasan kalurahan. Misalnya, membangun Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) bersama kalurahan-kalurahan tetangga.

### 3. Keadaan Demografi

**Tabel 2.2 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

| No           | Jenis Kelamin | Jumlah       | Persentase |
|--------------|---------------|--------------|------------|
| 1            | Laki-laki     | 2.634        | 49,68      |
| 2            | Perempuan     | 2.667        | 50,31      |
| <b>Total</b> |               | <b>5.301</b> | <b>100</b> |

*Sumber: Profil Kalurahan Umbulharjo Tahun 2022*

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir berimbang. Meskipun demikian, kita masih mendapati gambaran bahwa kuantitas perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Dengan kalimat lain, penduduk Kalurahan Umbulharjo didominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

Akan tetapi, kuantitas tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas. Artinya, meskipun secara kuantitas, penduduk berjenis kelamin mendominasi penduduk berjenis kelamin laki-laki, itu tidak menjamin kualitas perempuan. Hal ini karena dalam banyak hal, perempuan masih tertinggal jauh dari laki-laki. Misalnya, kaum perempuan seringkali mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan, mengembangkan keterampilan, memperoleh kesempatan kerja, mengakses ruang publik seperti musyawarah kalurahan maupun mengakses kesempatan untuk terlibat dalam pembangunan kalurahan. Semua keterbatasan yang ada pada perempuan sebetulnya berangkat dari akar persoalan yang sama yaitu budaya patriarki yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Dengan keadaan ini, maka skema pembangunan di Kalurahan Umbulharjo mesti menyeimbangkan pembangunan infrastruktur (pembangunan fisik) dan pembangunan sosial (pembangunan non-fisik). Pembangunan sosial atau pembangunan non-fisik diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kesadaran perempuan agar mampu berdaya dan menjadi pelaku aktif dalam agenda pembangunan yang diselenggarakan oleh Kalurahan Umbulharjo. Pembangunan sosial bisa diaplikasikan dengan skema pemberdayaan yaitu pemberian kesempatan bagi perempuan untuk mendiskusikan, merumuskan, dan memutuskan apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan mereka.

**Tabel 2.3 Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga**

| No           | Kepala Keluarga | Jumlah       | Persentase (%) |
|--------------|-----------------|--------------|----------------|
| 1            | Laki-laki       | 1.497        | 91,89          |
| 2            | Perempuan       | 132          | 8,10           |
| <b>Total</b> |                 | <b>1.629</b> | <b>100</b>     |

*Sumber: Profil Kalurahan Umbulharjo Tahun 2022*

Data di atas menunjukkan bahwa Kepala Keluarga di Kalurahan Umbulharjo masih didominasi oleh laki-laki yaitu 91,89% dari total Kepala Keluarga. Hal ini bisa dimaklumi karena budaya patriarki sudah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Dalam pandangan umum, Kepala Keluarga selalu diidentikkan dengan laki-laki. Pandangan ini dilandasi oleh alasan yang cukup sederhana. Misalnya, laki-laki (ayah) merupakan pencari nafkah, pemenuh kebutuhan, dan pelindung keluarga. Selain itu, laki-laki dinobatkan sebagai Kepala Keluarga karena kuat,

perkasa, tegas, dan sebagainya. Inilah yang disebut gender, yaitu suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan kaum perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Gender biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.

Karena konstruksi sosial inilah, kaum laki-laki harus bersifat kuat dan agresif. Kaum laki-laki harus terlatih dan tersosialisasi serta termotivasi untuk menuju sifat gender yang ditentukan oleh masyarakat, yaitu secara fisik lebih kuat dan besar. Sementara itu, urusan mendidik anak, mengelola atau merawat kebersihan dan keindahan rumah rumah dianggap sebagai “kodrat” perempuan. Dengan kalimat lain, kaum perempuan hanya beroperasi di ranah privat, yaitu rumah tangga.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, konstruksi sosial yang menempatkan kaum perempuan sebagai masyarakat kelas dua cukup kuat. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, istri sering disebut sebagai “*kanca wingking*” (teman di dapur). Ungkapan ini mengartikan bahwa segala nasib dari perempuan tergantung pada suami. Pepatah Jawa lain yang juga sering muncul, yaitu “*swarga nunut neraka katut*”. Pepatah ini mengandung arti bahwa kebahagiaan maupun penderitaan istri tergantung pada suami. Kebudayaan tersebut sangat mencerminkan minimnya kesempatan kepada kaum perempuan untuk terlibat dalam pembangunan desa. Secara umum, masyarakat masih menganggap bahwa tugas utama perempuan adalah mengurus rumah tangga. Pandangan ini dibentuk, disosialisasikan,

diperkuat, dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara sehingga menjadi kebiasaan.

Dengan konstruksi sosial semacam ini, maka kesempatan bagi kaum perempuan untuk menjadi Kepala Keluarga sangatlah kecil. Umumnya, kaum perempuan akan beralih status menjadi Kepala Keluarga apabila dia berstatus sebagai janda (entah karena sang suami telah meninggal dunia atau karena sang perempuan bercerai dengan suaminya) atau dia berstatus sebagai anak yatim-piatu. Selama peristiwa-persistiwa ini belum muncul, selama itu pula kaum perempuan tidak akan berstatus sebagai Kepala Keluarga.

**Tabel 2.4 Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

| No | Mata Pencaharian                | Jumlah | Persentase (%) |
|----|---------------------------------|--------|----------------|
| 1  | Petani                          | 1.131  | 42,72          |
| 2  | Buruh Tani                      | 110    | 4,11           |
| 3  | Penambang Gallian C Perorangan  | 289    | 10,80          |
| 4  | Montir                          | 25     | 0,93           |
| 5  | Tukan Batu                      | 62     | 2,31           |
| 6  | Tukang Kayu                     | 16     | 0,59           |
| 7  | Tukang Sumur                    | 3      | 0,11           |
| 8  | Tukang Jahit                    | 37     | 1,38           |
| 9  | Tukang Kue                      | 35     | 1,30           |
| 10 | Tukang Rias                     | 4      | 0,14           |
| 11 | Pengrajin Industri Rumah Tangga | 40     | 1,49           |
| 12 | Peternakan perorangan           | 19     | 0,71           |
| 13 | Pemilik Usaha Peternakan        | 6      | 0,22           |



|              |                                                 |              |            |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------|------------|
| 14           | Karyawan Perusahaan Swasta                      | 129          | 4,82       |
| 15           | Karyawan Perusahaan Pemerintah                  | 4            | 0,14       |
| 16           | Pemilik Perusahaan                              | 2            | 0,07       |
| 17           | Pedagang hasil bumi                             | 2            | 0,07       |
| 18           | Pemilik Usaha Jasa Transportasi dan Perhubungan | 12           | 0,44       |
| 19           | Buruh Usaha Jasa Transportasi dan Perhubungan   | 125          | 4,67       |
| 20           | Buruh Usaha Hotel dan Penginapan                | 15           | 0,56       |
| 21           | Pemilik Usaha Warung, Rumah Makan, dan Restoran | 55           | 2,05       |
| 22           | Pegawai Negeri Sipil                            | 47           | 1,75       |
| 23           | TNI                                             | 5            | 0,18       |
| 24           | Bidan Swasta                                    | 1            | 0,03       |
| 25           | Pensiunan PNS                                   | 41           | 1,53       |
| 26           | Tidak Mempunyai Mata Pencaharian Tetap          | 459          | 17,16      |
| <b>Total</b> |                                                 | <b>2.674</b> | <b>100</b> |

*Sumber: Profil Kalurahan Umbulharjo Tahun 2022*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Kalurahan Umbulharjo mempunyai mata pencaharian yang beragam. Mayoritas penduduk Kalurahan Umbulharjo bermata pencaharian sebagai petani dengan jumlah 1.131 (42,72%) orang. Hal ini berkorelasi dengan wilayah Kalurahan Umbulharjo yang didominasi oleh areal pertanian. Dengan keadaan ini, maka sekema pembangunan Kalurahan Umbulharjo mesti diarahkan untuk pembangunan pertanian terutama berkaitan dengan pemberdayaan petani.

Pemberdayaan petani dapat dilakukan dengan cara redistribusi akses dan redistribusi aset kepada para petani. Redistribusi akses berkaitan dengan distribusi tanah kepada individu, kelompok, atau badan usaha tertentu. Dengan kalimat lain, redistribusi akses berkaitan dengan kesempatan para petani untuk memiliki, menguasai, dan menggunakan tanah baik perorangan maupun kelompok. Sementara itu, untuk menunjang redistribusi akses, maka perlu juga dilakukan redistribusi aset. Redistribusi aset berkaitan dengan fasilitas dan program yang diarahkan untuk menunjang petani dalam mengelola lahan pertanian. Misalnya, memfasilitasi petani agar menemukan pasar yang jelas dalam memasarkan komoditi dan hasil produksinya.

## **B. Profil PKK Kalurahan Umbulharjo**

### **1. Latar Belakang**

PKK adalah pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang dimotori oleh perempuan dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Gerakan PKK merupakan Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Pemberdayaan Keluarga meliputi segala upaya bimbingan, pembinaan, dan pemberdayaan agar keluarga dapat hidup sejahtera, maju, dan mandiri. Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana,

pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang demi terlaksananya program PKK.

Tujuan Gerakan PKK adalah memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berakhlak mulia dan berbudi luhur;
- c. Sehat sejahtera;
- d. Maju mandiri;
- e. Kesetaraan dan keadilan gender; dan
- f. Kesadaran hukum dan lingkungan.

## 2. Kegiatan Umum

Berdasarkan Surat Keputusan Lurah Kalurahan Umbulharjo Nomor 65/KPTS.L/2021. Pembentukan Pengurus Tim Penggerak PKK Kalurahan Umbulharjo Kapanewon Cangkringan sebagai berikut:

**Tabel 2.5 Struktur Kepengurusan PKK**

| No | Nama               | Jabatan          |
|----|--------------------|------------------|
| 1  | Sri Wahyuni        | Ketua PKK        |
| 2  | Dian Angraini      | Wakil Ketua PKK  |
| 3  | Isna Inayatun      | Wakil Ketua PKK  |
| 4  | Soesy Hendarti     | Sekretaris       |
| 5  | Bernadetha Ira     | Sekretaris       |
| 6  | Ciptaningtyas      | Bendahara        |
| 7  | Fitri Eryanti      | Bendahara        |
| 8  | Nuryanti           | Ketua POKJA I    |
| 9  | Sihandani          | Ketua POKJA II   |
| 10 | Siti Yulidar       | Ketua POKJA III  |
| 11 | Maryanti           | Ketua POKJA IV   |
| 12 | Lis Titik Suprapti | Ketua POKJA PAUD |

*Sumber: Profil PKK Kalurahan Umbulharjo Tahun 2022*

**Tabel 2.6 Kegiatan Umum PKK**

| <b>No</b> | <b>Kegiatan/Program</b>                                  | <b>Keterangan</b>       |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>A</b>  | <b>Kegiatan Umum</b>                                     |                         |
|           | <b>1. Sekretaris</b>                                     |                         |
|           | a. Mengadakan pertemuan rutin pengurus                   | Sebulan sekali          |
|           | b. Mengadakan pertemuan rutin anggota dan pengurus       | Setiap tanggal 20       |
|           | c. Penerimaan dan pendistribusian surat masuk dan keluar | Setiap bulan            |
|           | d. Pembuatan laporan                                     | Desember                |
|           | <b>2. Keuangan</b>                                       |                         |
|           | a. Mengerjakan administrasi keuangan                     | Setiap akhir bulan      |
|           | b. Menyusun Laporan Keuangan                             | Desember                |
| <b>B</b>  | <b>Kegiatan Kelompok Kerja</b>                           |                         |
|           | <b>1. Pokja I</b>                                        |                         |
|           | a. Bidang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila           |                         |
|           | 1. Pembinaan simulasi PKDRT +Traficking                  | Pertemuan pkk           |
|           | 2. Pembinaan Perlindungan Anak                           | Pertemuan kader balita  |
|           | 3. Penanggulangan NAPZA                                  | Pertemuan BKR           |
|           | 4. Pembinaan Traficking                                  | Pertemuan PKK           |
|           | 5. Pembinaan Pola Asuh                                   | Pertemuan PAUD          |
|           | b. Bidang Gotong Royong                                  |                         |
|           | 1. Pembinaan BKL                                         | Setiap bulan di 9 dusun |
|           | 2. Kerja Bakti Lingkungan                                | Setiap minggu sekali    |
|           | 3. Pembinaan Rukun Kematian                              | Pertemuan Lansia        |
|           | 4. Pembinaan Keagamaan :                                 |                         |
|           | Pengajian jelang ramadhan                                |                         |
|           | Syawalan                                                 |                         |
|           | <b>2. Pokja II</b>                                       |                         |
|           | a. Bidang Pendidikan dan Ketrampilan                     |                         |

|  |                                             |                        |
|--|---------------------------------------------|------------------------|
|  | 1. Pelatihan dan pembinaan BKB              | Setiap bulan tgl 19    |
|  | 2. Pembinaan POS PAUD                       | Setiap tanggal 15      |
|  | 3. Lomba administrasi dusun                 | Di akhir tahun         |
|  | 4. Pelaksanaan Sekolah Jumat                | Setiap tanggal 20      |
|  | b. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi       |                        |
|  | 1. Pembinaan UP2K                           | Setiap bulan sekali    |
|  | 2. Pembinaan USEP                           | Setiap bulan sekali    |
|  | <b>3. Pokja III</b>                         |                        |
|  | a. Bidang Pangan                            |                        |
|  | 1. Pelatihan membuat kue kering/basah       |                        |
|  | 2. Pelaksanaan lomba masak hari jadi Sleman |                        |
|  | 3. Penyuluhan menu bergizi dan seimbang     | Pertemuan kader balita |
|  | b. Bidang Sandang                           |                        |
|  | 1. Pelatihan Batik Jumputan                 | Bulan Oktober          |
|  | c. Bidang Perumahan dan Tata Laksana        |                        |
|  | 1. Hatinya PKK                              | Setiap tanggal 20      |
|  | <b>4. Pokja IV</b>                          |                        |
|  | a. Kesehatan                                |                        |
|  | 1. Penyuluhan Kesehatan                     | Bulan November         |
|  | 2. Pertemuan kader balita desa              | Setiap tanggal 26      |
|  | 3. Pemberantasan sarang nyamuk (Pokjanal)   | Bulan September        |
|  | 4. Pertemuan kader lansia                   | Setiap tanggal 1       |
|  | 5. Pertemuan kader kesehatan jiwa           | Setiap tanggal 7       |
|  | b. Kelestarian lingkungan hidup             |                        |
|  | 1. Pembinaan PHBS                           | Bulan Maret            |

|  |                                       |                |
|--|---------------------------------------|----------------|
|  | 2. Pengelolaan sampah                 | Bulan November |
|  | c. Perencanaan Sehat                  |                |
|  | 1. Sosialisasi Kespro dan KB HIV Aids | Bulan November |
|  | 2. Senam Bersama                      | Akhir Tahun    |

*Sumber: Profil PKK Kalurahan Umbulharjo Tahun 2022*

### **3. Kegiatan Khusus**

#### a. Pembinaan Program UP2K PKK

Pembinaan program UP2K PKK dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan ketrampilan dalam segala bidang.

#### b. Pembinaan Program Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera

TP PKK secara bertahap melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada kelompok binaan yang sudah ada. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan kegiatan PAUD terintegrasi dengan posyandu balita dan BKB.

#### c. Untuk meningkatkan kapasitas dan menjalin silaturahmi dengan para anggota, PKK mengadakan lomba senam antar dusun di akhir tahun.

#### d. Lomba antar dusun Lomba administrasi PKK setiap tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arikuntoro, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Eko, Sutoro. 2004. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD Press.
- Eko, Sutoro. 2015. *Regulasi Baru Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Eko, Sutoro. 2017. *Desa Baru Negara Lama*. Yogyakarta: Pascasarjana STPMD "APMD".
- Faqih, Mansoer. 2008. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Fauzan, Alimah. 2017. *Advokasi Kesehatan bagi Kelompok Marginal Berbasis Data Kesejahteraan Lokal: Pembelajaran Pengorganisasian Komunitas Perempuan Pembaharu Desa Melawan Kemiskinan dan Mengawal Pembangunan Desa*. Dalam Anang Zakaria (Ed.) 2017. *Potret Politik dan Ekonomi Lokal di Indonesia: Dinamika Demokratisasi, Pengembangan Ekonomi, dan Kawasan Perdesaan*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment.
- Haryanto, Titok (Ed.). 2015. *Pelebagaan Demokrasi melalui Musyawarah Desa*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment.
- Haslam, et.al. 1994. *Stereotyping and Social Reality*. UK: Basil Blackwell Limited.
- Ife, Jim. 2008. *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practise*. Melbourne: Longman.
- Kartasasminta, G. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.

- Kartasasminta, G. 1997. *Kemiskinan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pierson, J. 2002. *Tackling Social Exclusion*. London and New York: Routledge.
- Sufian. 1995. *Administrasi, Organisasi, dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Rosdakarya.
- Tamanaha, Brian Z. 2004. *On the Rule of Law: History, Politics, and Theory*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Zed, M. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wrihatnolo, R.R. dan R.N Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Alex Media Komputerindo.

## **B. Jurnal**

- Agustin, Nikmatul Laily, Slamet Muschin, dan Roni Pindahanto Widodo. *Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan PKK dalam Menangani Kesehatan Anak, Ibu Hamil, dan Lansia Sesuai 10 Program Pokok PKK di Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang*. Malang: Universitas Islam, Jurnal Administrasi Publik, Volume 13, Nomor 2, Tahun 2019.
- Arisandi, Desi. *Peran PKK di dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Muara Bengkal Ilir, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2015.
- Hanis, Nikma Wahyuni dan Atika Marzaman. *Peran Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Telaga*. Gorontalo: Universitas Gorontalo, Jurnal Ilmu Administrasi, Volume 8, Nomor 2, Desember 2019.



- Haryono, Tri. *Partisipasi Perempuan Desa Karang Sari dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusif*. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keilmiah*, Volume IX, Nomor 2, Oktober 2020.
- Indrawati, Rizky. *Strategi Pelaksanaan Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Samarinda Utara*. Samarinda: Universitas Mulawarman, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2017.
- Malau, Waston. *Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan*. Medan: Universitas Negeri Medan, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 6, Nomor 2, 2014.
- Nurdewantoro, Bambang, Eny Yuniriyanti, dan Ririn Sudarwati. *Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Dasa Wisma PKK*. Malang: Universitas Merdeka, *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2015.
- Pratama, Crivis. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan Desa Joho di Lereng Gunung Wilis*. Surabaya: Universitas Airlangga, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 1, Nomor 1, 2013.
- Probosiwi, Ratih. *Desa Inklusif sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan bagi Penyandang Disabilitas*. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Volume 41, Nomor 3, Desember 2017.
- Sa'idah, Halimatu. *Pemberdayaan Perempuan Melalui Organisasi PKK di Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon*. Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Skripsi. 2021.
- Saptandari, Pinky. *Lima Tingkat Pemberdayaan Perempuan*. *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik*, Volume XII, Nomor 2, Tahun 1999.

### **C. Wawancara**

Wawancara peneliti dengan Ketua PKK Kalurahan Umbulharjo, Ibu Sri Wahyuni pada 11/01/2022.

Wawancara peneliti dengan Wakil Ketua PKK Kalurahan Umbulharjo, Ibu Dian Anggraini pada 24/01/2022.

Wawancara peneliti dengan Ketua POKJA 1 PKK Kalurahan Umbulharjo, Ibu Nuryanti pada 24/01/2022.

Wawancara peneliti dengan masyarakat Kalurahan Umbulharjo, Ibu Suyatmi pada 24/01/2022.

Wawancara peneliti dengan Kader PKK Kalurahan Umbulharjo, Ibu Anti pada 28/01/2022.

Wawancara peneliti dengan Kader PKK Kalurahan Umbulharjo, Ibu Sriyamini pada 28/01/2022.

Wawancara peneliti dengan Kader Kalurahan Umbulharjo, Ibu Sri Lestari pada 24/01/2022.

Wawancara peneliti dengan masyarakat Kalurahan Umbulhajo, Bapak Sriyono pada 26/01/2022.

Wawancara peneliti dengan Kamituwa Kalurahan Umbulhajo, Bapak Misman pada 03/02/2022.

### **D. Sumber Lain**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Gender**

1. Bagaimana peran perempuan di dalam rumah tangga maupun di dalam kegiatan masyarakat?
2. Mengapa diskriminasi tidak boleh dilakukan berdasarkan perbedaan jenis kelamin?
3. Bagaimana kaum perempuan mendapatkan akses terhadap program di pemerintahan berkaitan dengan kepentingannya?
4. Bagaimana alokasi anggaran dan pembiayaan terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan perempuan?

### **B. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Institusi lokal**

1. Bagaimana asal-usul PKK di desa, dibentuk oleh masyarakat atau oleh pemerintah?
2. Bagaimana PKK memperjuangkan kepentingan perempuan di desa?
3. Bagaimana keterlibatan ibu dan saudara dalam PKK?
4. Bagaimana spirit ideologi atau program yang dimiliki oleh PKK diwujudkan?
5. Bagaimana sosialisasi pelatihan yang dilakukan PKK bagi kaum perempuan? Siapa pelaku pelatihannya?
6. Bagaimana PKK merencanakan kegiatan untuk memperjuangkan kepentingan kaum perempuan?

7. Sejauh ini, apa saja kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Umbulharjo untuk PKK?
8. Bagaimana fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan Umbulharjo dikelola dan dilaksanakan?
9. Bagaimana PKK memperjuangkan kaum perempuan di Umbulharjo?
10. Bagaimana PKK mengatasi kendala-kendala dalam memperjuangkan kepentingan kaum perempuan?

#### **Institusi Lokal**

1. Bagaimana PKK mewujudkan kemandirian sebagai organisasi perempuan?
2. Bagaimana PKK menjadi saluran kepentingan bagi kaum perempuan?
3. Bagaimana PKK mewujudkan Prakarsa (usulan) dalam mengelola persoalan-persoalan perempuan di Umbulharjo?

#### **C. Pemberdayaan**

1. Bagaimana pendapat Ibu tentang perempuan yang berkiprah atau terlibat di masyarakat dan pemerintahan?
2. Bagaimana keterampilan perempuan dalam mengelola persoalannya di pemerintahan dan pembangunan?
3. Bagaimana strategi yang harus dilakukan agar perempuan memiliki kekuasaan dan keberdayaan dalam mengelola kepentingannya?